LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)

Jawa Barat
Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928
E-mail:bbp2tp@litbang.deptan.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
I. Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca
III. Laporan Operasional
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
V. Catatan atas Laporan Keuangan
    A. Penjelasan Umum
    B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
        B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
        B.2 Belanja
        B.3. Belanja Pegawai
        B.4. Belanja Barang
        B.5. Belanja Modal
            B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
            B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
            B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
            B.5.4. Belanja Modal Lainnya
    C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
        C.1. Aset Lancar
            C.1.1. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
            C.1.2. Persediaan
            C.1.3. Persediaan yang Belum Diregister
        C.2. Aset Tetap
            C.2.1. Peralatan dan Mesin
            C.2.2. Gedung dan Bangunan
            C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan
            C.2.4. Aset Tetap Lainnya
            C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
        C.3. Piutang Jangka Panjang
        C.4. Aset Lainnya
            C.4.1. Aset Lain-lain
            C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
        C.5. Kewajiban Jangka Pendek
            C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka
        C.6. Ekuitas
            C.6.1. Ekuitas
    D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
        D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
        D.2. Beban Pegawai
        D.3. Beban Persediaan
        D.4. Beban Barang dan Jasa
        D.5. Beban Pemeliharaan
        D.6. Beban Perjalanan Dinas
        D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E.1. Ekuitas Awal
E.2. Surplus/Defisit-LO
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
E.4. Transaksi Antar Entitas
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
E.5. Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si
NIP. 19680918 199303 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp125.126.349,00 atau mencapai 455,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp27.500.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp84.592.146.706,00 atau mencapai 89,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp94.961.276.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.468.115.045,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.226.579.719,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.241.535.326,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.650.333,00 dan Rp21.428.464.712,00..

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp65.791.817,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp82.980.335.278,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-82.914.543.461,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-244.605.075,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-83.159.148.536,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp18.727.722.380,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-83.159.148.536,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.471.670.511,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp84.388.220.357,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp21.428.464.712,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	27.500.000,00	125.126.349,00	455,00	174.676.759,00
Jumlah Pendapatan		**27.500.000,00**	**125.126.349,00**	**455,00**	**174.676.759,00**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	8.411.116.000,00	8.351.469.298,00	99,29	8.277.340.841,00
Belanja Barang	B.4.	84.956.413.000,00	74.732.009.063,00	87,97	21.616.000.965,00
Belanja Modal	B.5.	1.593.747.000,00	1.508.668.345,00	94,66	4.128.970.940,00
Jumlah Belanja		**94.961.276.000,00**	**84.592.146.706,00**	**89,08**	**34.022.312.746,00**

II. NERACA

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	271.500.000,00	**0,00**
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.2.	2.833.000,00	0,00
Persediaan	C.1.3.	1.952.246.719,00	377.458.700,00
Jumlah Aset Lancar		**2.226.579.719,00**	**377.458.700,00**
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	13.903.587.216,00	12.938.989.512,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	16.003.083.900,00	14.819.976.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	1.544.823.300,00	**1.832.037.300,00**
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	443.023.459,00	588.207.618,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-12.652.982.549,00	-11.825.163.262,00
Jumlah Aset Tetap		**19.241.535.326,00**	**18.354.047.268,00**
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	45.200.000,00	1.548.620.631,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-45.200.000,00	-1.534.849.219,00
Jumlah Aset Lainnya		**0,00**	**13.771.412,00**
Jumlah Aset		**21.468.115.045,00**	**18.745.277.380,00**
Kewajiban Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.	39.650.333,00	17.555.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**39.650.333,00**	**17.555.000,00**
Jumlah Kewajiban		**39.650.333,00**	**17.555.000,00**
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	21.428.464.712,00	18.727.722.380,00
Jumlah Ekuitas		**21.428.464.712,00**	**18.727.722.380,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**21.468.115.045,00**	**18.745.277.380,00**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	65.791.817,00	79.015.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		**65.791.817,00**	**79.015.000,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	8.351.469.298,00	8.277.340.841,00
Beban Persediaan	D.3.	2.082.668.510,00	2.148.181.150,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	13.876.703.142,00	9.987.131.520,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.715.139.483,00	1.863.506.649,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	8.777.426.014,00	7.674.856.882,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat	D.7.	36.492.378.033,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	9.786.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.898.550.798,00	2.362.929.198,00
JUMLAH BEBAN		**82.980.335.278,00**	**32.313.946.240,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-82.914.543.461,00**	**-32.234.931.240,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	21.555.999,00	22.775.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	13.771.412,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	999.185.410,00	150.407.634,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	1.251.575.072,00	1.843.539,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**-244.605.075,00**	**171.339.095,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**-83.159.148.536,00**	**-32.063.592.145,00**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	18.727.722.380,00	17.018.376.137,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-83.159.148.536,00	-32.063.592.145,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	1.471.670.511,00	2.560.866,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	409.069.000,00	
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	1.062.601.511,00	2.560.866,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	84.388.220.357,00	33.770.377.522,00
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**21.428.464.712,00**	**18.727.722.380,00**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian atau lebih dikenal sebagai BB Pengkajian merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian.

Selain tugas utama tersebut, Kepala Badan Litbang Pertanian juga memberikan mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang Pertanian. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan oleh BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya.

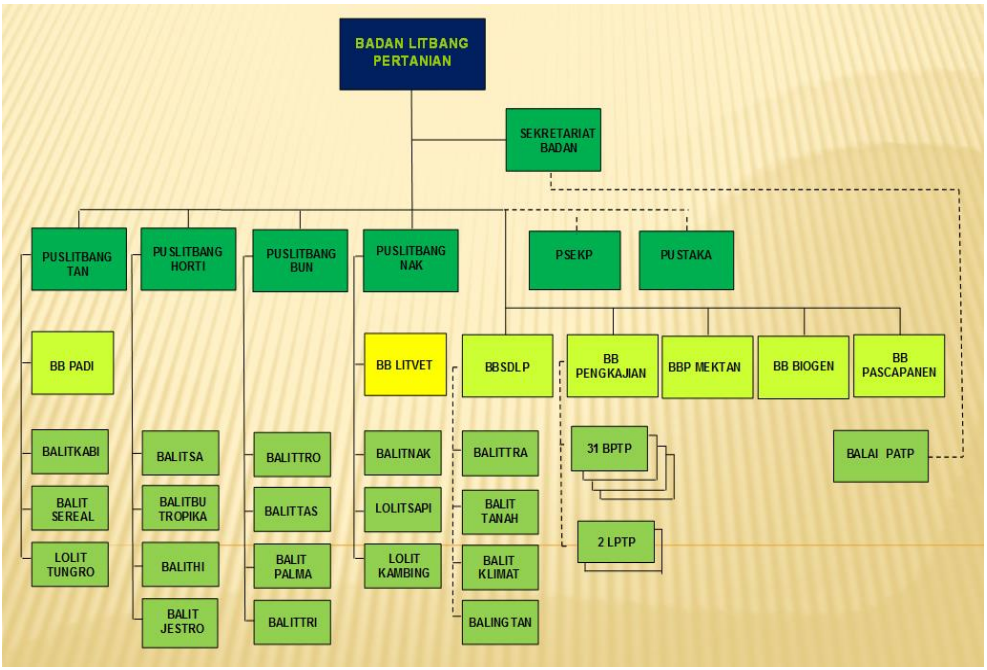

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

STRUKTUR ORGANISASI & SDM

Struktur organisasi BB Pengkajian diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Pengkajian membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan. Kepala Bidang Program dan Evaluasi membawahi Kasie Program dan Kasie Monitoring dan Evaluasi. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian membawahi Kasie Kerjasama dan Kasie Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung dibawah Kepala BB Pengkajian.

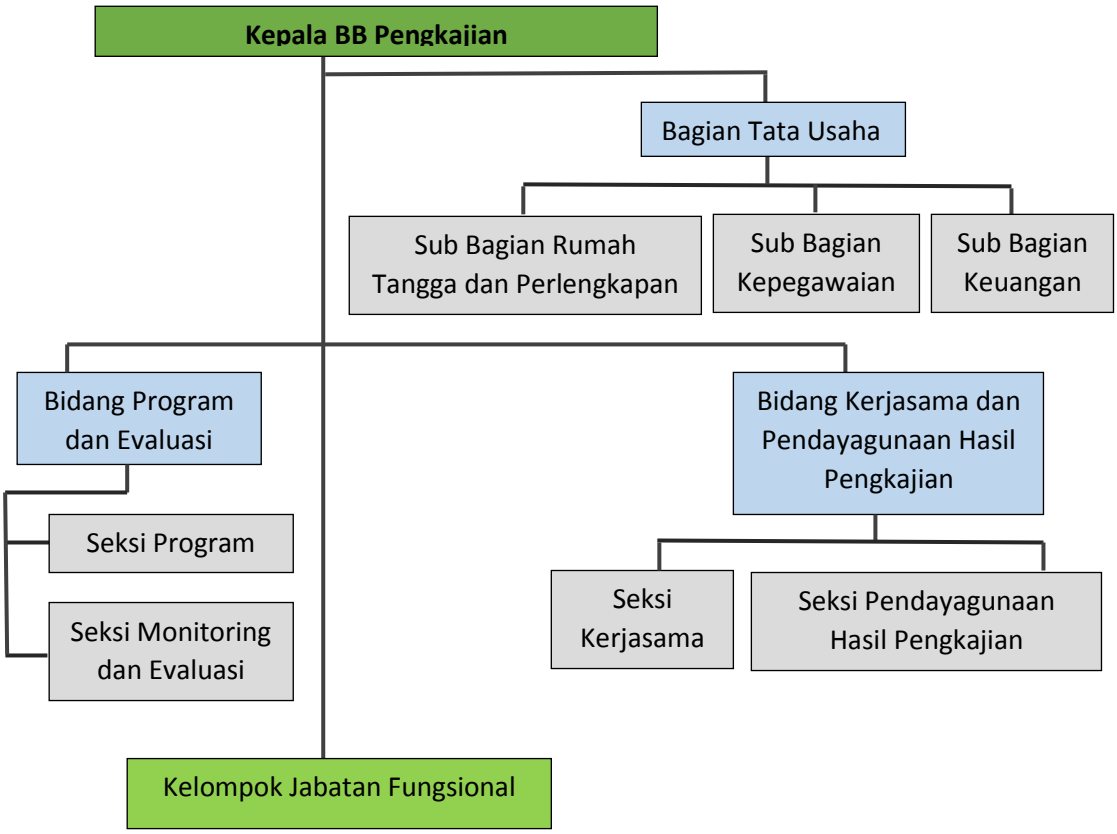

Gambar 2. Struktur Organisasi BB Pengkajian

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2019 sebanyak 98 orang dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :

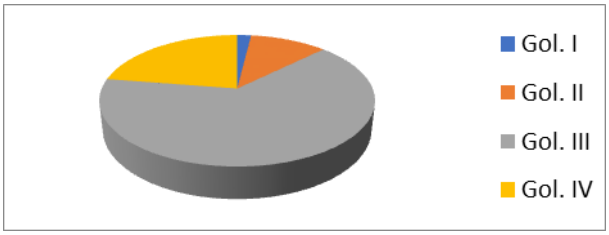

Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 63 orang dan golongan IV sebanyak 23 orang. Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2019 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1. Peneliti	33
- Peneliti Utama	6
- Peneliti Madya	9
- Peneliti Muda	11
- Peneliti Pertama	7
2. Penyuluh	13
- Penyuluh Utama	1
- Penyuluh Madya	3
- Penyuluh Muda	6
- Penyuluh Pertama	2
- Calon Penyuluh	1
3. Analis Kepegawaian	3
- Analis Kepegawaian Madya	1
- Analis Kepegawaian Muda	2
- Analis Kepegawaian Pelaksana	1
4. Pustakawan	1
- Pustakawan Terampil	1
5. Calon Pranata Komputer Pertama	1
6. Jabatan Fungsional Umum	47

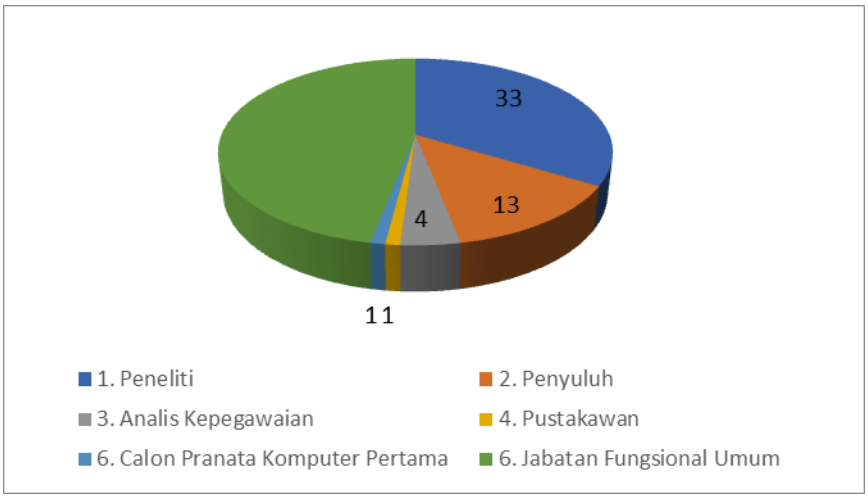

Komposisi jabatan fungsional di BB Pengkajian didominasi oleh jabatan fungsional umum yaitu 47 % yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama penelitian dan pengkajian, diseminasi, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BB PENGKAJIAN

Balai Besar Pengkajian secara hierarkis merupakan Bussiness Unit Badan Litbang Pertanian untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga menjadi akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan. Berdasarkan hal tersebut :

Visi Balai Besar Pengkajian :

"Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan"

Misi Balai Besar Pengkajian :

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri

2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan scientific recognition dan impact recognition.

Tujuan Balai Besar Pengkajian :

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis advanced technology dan bioscience, aplikasi IT dan adaptif terhadap dinamika iklim;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional

Sasaran Operasional Balai Besar Pengkajian :

1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi
2. Terdiseminasikannya inovasi pertanian teknologi pertanian bioindustri spesifik lokasi
3. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi.

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Balitbangtan merupakan salah satu unit eselon satu dibawah Kementerian Pertanian, sehingga arah kebijakan Balitbangtan terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Pertanian. Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan nasional.Secara lengkap arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015-2019 itu antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatanproduktivitas dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian.
3. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Sementara itu memperhatikan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam SIPP 2015-2045, pembangunan pertanian ke depan diarahkan untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Visi pembangunan pertanian 2015-2045 adalah **“terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”.**

Untuk mewujdkan visi tersebut, misi yang terkait erat dengan tupoksi Balitbangtan adalah:

1. Mengembangkan sistem usahatani pertanian tropika agroekologi yang berkelanjutan dan terpadu dengan bioindustri melalui perlindungan, pelestarian,

pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetik, serta perluasan, pengembangan dan konservasi lahan pertanian;
2. Mengembangkan kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi dalam Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan melalui perlindungan dan pemberdayaan insan pertanian dan perdesaan;
3. Membangun sistem pengolahan pertanian melalui perluasan dan pendalaman pasca panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan guna menumbuhkan nilai tambah;
4. Mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi.

Merujuk pada Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, visi Kementerian Pertanian adalah **"Terwujudnya system pangan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"**. Sedangkan misinya adalah mewujudkan system pertanian bioindustri berkelanjutan yang bertujuan untuk memningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

Visi dan misi Kementerian pertanian tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 yaitu:
1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

Arah Kebijakan Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Inovasi Spesifik Lokasi

Arah kebijakan pengkaian dan diseminasi teknologi inovasi spesifik lokasi 2015-2019 harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pertanian Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam SIPP 2015-2045, serta arah kebijakan litbang pertanian. Berdasarkan kebijakan litbang pertaian untuk pengembangan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bio-industri, maka arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi mendukung pertanian bioindustri berbasis sumberdaya lokal, sesuai dengan Program Badan Litbang Pertanian 2015-2019 : penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan.

Secara rinci arah kebijakan Pengembangan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi ke depan adalah :
1. Mengembangkan kegiatan pengkajian dan diseminasi mendukung peningkatan produksi hasil pertanian wilayah, sebagai upaya percepatan penerapan swasembada pangan nasional.
2. Mendorong pengembangan dan penerapan advance technology untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya lokal sepsifik lokasi, yang jumlahnya semakin terbatas.
3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif sehingga memungkinkan optimalisasi sumberdaya manusia dalam pengembangan kapasitasnya dalam melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi.
4. Mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara UK/UPT lingkup Balitbangtan dengan berbagai lembaga terkait, terutama dengan stakeholder di daerah.

Adapun sasaran pengembangan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya inovasi pertanian spesifik lokasi mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan
2. Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi, serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
3. Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi
4. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi
5. Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Dalam rangka peningkatan dukungan inovasi dan teknologi sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, maka upaya yang harus dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian
2. Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit/tanaman/ternak
3. Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya, teknik pasca panen, tehnik pengolahan hingga teknik pengemasan dan pemasaran.
4. Meningkatkan diseminasi teknologi kepada petani secara luas
5. Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan.

Strategi

Uraian pada bagian ini mengemukakan berbagai strategi yang dikembangkan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Prinsip dasar dari strategi ini adalah untuk terjadinya percepatan dalam pencapaian sasaran strategis, atau strategi ini menggambarkan upaya unusual yang perlu dikembangkan dalam pencapaian sasaran strategis.

Sasaran 1 : Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui penyempurnaan sistem dan perbaikan fokus kegiatan pengkajian yang didasarkan pada kebutuhan pengguna (petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya) dan potensi sumberdaya wilayah. Penyempurnaan sistem pengkajian mencakup metode pelaksanaan pengkajian serta

monitoring dan evaluasi. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Pengkajian inovasi pertanian spesifik lokasi.

Sasaran 2 : Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Penyediaan dan penyebarluasan inovasi pertanian.

Sasaran 3 : Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan efektivitas kegiatan tematik di BPTP yang disinergikan dengan UK/UPT lingkup Balitbangtan, terutama dalam menerapkan hasil-hasil litbang pertanian dalam super impose model pertanian bio-industri berbasis sumberdaya lokal.

Sasaran 4 : Rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan kajian-kajian tematik terhadap berbagai isu dan permasalahan pembangunan pertanian baik bersifat responsif terhadap dinamika kebijakan dan lingkungan strategis maupun antisipatif terhadap pandangan futuristik kondisi pertanian pada masa mendatang. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: analisis kebijakan mendukung empat sukses Kementerian Pertanian.

Sasaran 5 : Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan efektivitas manajemen institusi. Strategi ini diwujudkan ke dalam delapan sub kegiatan yaitu:

1. Penguatan kegiatan pendampingan model diseminasi dan program strategis kementan serta program strategis Badan Litbang Pertanian
2. Penguatan manajemen mencakup perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi institusi
3. Pengembangan kompetensi SDM
4. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penerapan ISO 9001:2008
5. Peningkatan pengelolaan laboratorium
6. Peningkatan pengelolaan kebun percobaan
7. Peningkatan kapasitas instalasi UPBS
8. Jumlah publikasi nasional dan internasional
9. Peningkatan pengelolaan data base dan website.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 dalam menjalankan tupoksinya Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian didukung oleh sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) melalui DIPA Nomor DIPA-018.09.2.648673/2019. Selama periode berjalan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian telah mengadakan enam kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dan dua kali revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi DIPA dilakukan karena adanya beberapa kali perubahan anggaran pada kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan, Penyesuaian akun dan detail untuk belanja modal maupun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan fotokopi, konsumsi, narasumber, dan pergeseran perjalanan dinas, Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pembantu tenaga medis dan penyesuaian honor operasional satuan kerja. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	27.500.000,00	27.500.000,00
Jumlah Pendapatan	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.908.650.000,00	8.351.981.000,00
Belanja Lembur	107.685.000,00	59.135.000,00
Belanja Barang Operasional	2.109.369.000,00	2.178.089.000,00
Belanja Barang Non Operasional	8.231.355.000,00	10.818.959.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.446.472.000,00	2.104.962.000,00
Belanja Jasa	2.350.200.000,00	3.004.483.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.699.879.000,00	1.698.487.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.743.900.000,00	9.329.000.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	60.259.140.000,00	55.822.433.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	893.801.000,00	986.801.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	556.946.000,00	556.946.000,00
Belanja Modal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Belanja	**92.357.397.000,00**	**94.961.276.000,00**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp125.126.349,00 atau mencapai 455,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.500.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
Akun Pendapatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	27.500.000,00	106.610.149,00	387,67
Pendapatan Lain-lain	0,00	18.516.200,00	0,00
Jumlah	**27.500.000,00**	**125.126.349,00**	**455,00**

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 28.37% dibandingkan TA 2018 dikarenakan adanya penurunan jumlah orang yang menginap di mess BBP2TP dan penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu tidak terlalu besar dibandingkan tahun 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	106.610.149,00	71.724.000,00	48,64
Pendapatan Lain-lain	18.516.200,00	102.952.759,00	-82,01
Jumlah	**125.126.349,00**	**174.676.759,00**	**-28,37**

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 28.37%. Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2019 yaitu:

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin merupakan pendapatan dari lelang BMN yang sudah dihapuskan penggunaannya (risalah lelang nomor 1049/32/2019 tanggal 3 Juli 2019)
2. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa kantin dari bulan januari sampai dengan Februari 2019 sebesar Rp. 633.000,00 berdasarkan pada surat perjanjian B-103.2/RT.010/H.12/01/2019 tanggal 1 Januari 2019, sewa rumah dinas an. Dr. Sigid Handoko,SP, M.Si dari bulan januari sampai dengan Agustus 2019 melalui potongan SPM Gaji sebesar Rp. 1.092.150,00 dan sewa tanah, gedung dan bangunan untuk ATM BRI sebesar Rp.50.979.000,00 sesuai kontrak nomor B.239-KC/XIV/12/2019 tanggal 11 Desember 2019.

3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp32.350.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan sewa rumah tamu (*guest house*) yang mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2019.
4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL yaitu pengembalian belanja pegawai gaji dan tunjangan fungsional tahun 2018 an. Tri Nova Rp. 6.396.200,00 dan Dr. Sudi Mardianto Rp. 11.550.000,00 dan penerimaan kembali belanja fungsional sebesar Rp. 570.000,00 yang dikembalikan ke negara pada tahun 2019**.**

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp84.592.146.706,00 atau 89,08% dari anggaran belanja sebesar Rp94.961.276.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	8.411.116.000,00	8.363.921.638,00	99,44
Belanja Barang	84.956.413.000,00	74.735.879.063,00	87,97
Belanja Modal	1.593.747.000,00	1.508.668.345,00	94,66
Total Belanja Kotor	**94.961.276.000,00**	**84.608.469.046,00**	**89,10**
Pengembalian Belanja		**-16.322.340,00**	**0.00**
Total Belanja	**94.961.276.000,00**	**84.592.146.706,00**	**89,08**

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	8.351.469.298,00	8.277.340.841,00	0,90
Belanja Barang	74.732.009.063,00	21.616.000.965,00	245,73
Belanja Modal	1.508.668.345,00	4.128.970.940,00	-63,46
Total Belanja	**84.592.146.706,00**	**34.022.312.746,00**	**148,64**

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja
TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 31-Des-19	Anggaran 31-Des-18	.%
Belanja Pegawai	8.411.116.000,00	8.394.347.000,00	0,20%
Belanja Barang	84.956.413.000,00	22.755.336.000,00	273,35%
Belanja Modal	1.593.747.000,00	4.335.896.000,00	-63,24%
Total Belanja	**94.961.276.000,00**	**35.485.579.000,00**	**167,61%**

Dibandingkan dengan 31 Desember 2019, Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 148.64% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar 0.90 % disebabkan adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan golongan, kenaikan jabatan fungsional.
2. Kenaikan Realisasi Belanja Barang sebesar 245.73 % disebabkan penambahan anggaran pada program Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan.
3. Penurunan Belanja Modal sebesar 63.46 % disebabkan berkurangnya anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2019

Pengembalian belanja sebesar Rp16.322.340,00 terdiri dari :

a. Pengembalian belanja perjalanan dinas an. Dr. Lira Mailena sebesar Rp410.000,00 dikarenakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
b. Pengembalian gaji tahun berjalan bulan Januari – Maret 2019 An. Tri Nova Aliyanti, S.Kom sebesar Rp9.594.300,00
c. Pengembalian belanja perjalanan dinas an. Drs. Suyud sebesar Rp25.000,00 dikarenakan kelebihan pembayaran
d. Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota an. Ropik, S,IP, M,Si sebesar Rp150.000,00
e. Pengembalian belanja barang peralatan dan mesin yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000,00 karena kondisi ayam yang sudah mati sebanyak 5 RTM di kabupaten Cirebon.
f. Pengembalian belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp2.858.040,00
g. Pengembalian belanja honor operasional satuan kerja an. Emin Aminah sebesar Rp285.000,00

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.351.469.298,00 dan Rp8.277.340.841,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,90% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan golongan, kenaikan jabatan fungsional.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.304.837.638,00	8.171.398.286,00	1,63
Belanja Lembur	59.084.000,00	107.221.000,00	-44,90
Jumlah Belanja Kotor	**8.363.921.638,00**	**8.278.619.286,00**	**1,03**
Pengembalian Belanja Pegawai	**-12.452.340,00**	**-1.278.445,00**	**874,02**
Jumlah Belanja	**8.351.469.298,00**	**8.277.340.841,00**	**0,90**

Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp12.452.340,00 terdiri dari :

a. Pengembalian gaji pokok PNS sebesar Rp7.161.678,00
b. Pengembalian pembulatan gaji PNS sebesar Rp8.250,00
c. Pengembalian belanja tunjangan suami/istri PNS sebesar Rp808.860,00
d. Pengembalian belanja tunjangan anak PNS sebesar Rp161.772,00
e. Pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp810.000,00
f. Pengembalian tunjangan beras PNS sebesar Rp651.780,00
g. Pengembalian tunjangan umum PNS sebesar Rp2.850.000,00

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74.732.009.063,00 dan Rp21.616.000.965,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 245,73% dari TA 2018. Kenaikan tersebut disebabkan karena kegiatan desiminasi, pengkajian, bimtek dan kegiatan strategis kementerian salah satunya adalah kegiatan program BEKERJA yang berlangsung di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Banyuwangi.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.057.556.000,00	1.759.946.355,00	16,91
Belanja Barang Non Operasional	9.424.022.188,00	6.001.499.550,00	57,03
Belanja Barang Persediaan	2.084.645.160,00	2.166.966.331,00	-3,80
Belanja Jasa	2.395.409.954,00	2.225.685.615,00	7,63
Belanja Pemeliharaan	1.671.573.483,00	1.787.046.232,00	-6,46
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.778.011.014,00	7.682.648.882,00	14,26

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	48.324.661.264,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**74.735.879.063,00**	**21.623.792.965,00**	**245,62**
Pengembalian Belanja Barang	**-3.870.000,00**	**-7.792.000,00**	**-50,33**
Jumlah Belanja	**74.732.009.063,00**	**21.616.000.965,00**	**245,73**

Kenaikan dan penurunan belanja barang antara lain :

a. Kenaikan belanja barang operasional sebesar 16.91% meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak.
b. Kenaikan belanja barang non operasional sebesar 57.03% meliputi belanja bahan pendukung kegiatan dan upah tenaga kerja terutama di kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan.
c. Penurunan belanja barang persediaan sebesar 3.80% yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku.
d. Kenaikan belanja jasa sebesar 7.63% meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa. Belanja jasa profesi sudah mengalami kenaikan yang cukup siginifikan karena kegiatan yang menyangkut jasa profesi seperti paket meeting dalam dan luar kota
e. Penurunan belanja pemeliharaan sebesar 6.46% disebabkan karena fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
f. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 14.26% meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota
g. Adanya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dengan nilai Rp48.324.661.264,00 terdiri dari belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp1.078.392.600,00; belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp37.185.768.664,00 dan belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang senilai Rp10.060.500.000,00 untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian yaitu kegiatan pengembangan hasil inovasi ternak unggas untuk mendukung pengentasan kemiskinan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Banyuwangi dengan total 20.121 RTM

Pengembalian belanja barang sebesar Rp3.870.000,00 terdiri dari :
a. Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp.435.000,00
b. Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp150.000,00
c. Pengembalian belanja barang peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000,00
d. Pengembalian belanja barang honor operasional satuan kerja sebesar Rp285.000,00

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Barang
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Barang (52)		Anggaran 31-Des-19	Anggaran 31-Des-18	Naik (Turun) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.801.729.000	1.598.239.000	12,73%
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	57.000.000	57.000.000	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50.000.000		
521115	Belanja Honor Operasional Satker	269.360.000	166.730.000	61,55%
521211	Belanja Bahan	4.965.949.000	2.914.549.000	70,38%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.495.470.000	282.610.000	1136,85%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.357.540.000	2.992.420.000	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.104.962.000	2.223.823.000	-5,34%
522111	Belanja Langganan Listrik	354.000.000	354.000.000	0,00%
522112	Belanja Langganan Telepon	48.000.000	54.000.000	-11,11%
522113	Belanja Langganan Air	60.000.000	54.000.000	11,11%
522131	Belanja Jasa Konsultan	22.000.000	0	#DIV/0!
522141	Belanja Sewa	274.800.000	134.900.000	103,71%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.914.000.000	1.608.400.000	19,00%
522191	Belanja Jasa Lainnya	331.683.000	343.886.000	-3,55%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	550.780.000	714.780.000	-22,94%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	1.147.707.000	1.373.799.000	-16,46%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	7.570.600.000	6.058.000.000	24,97%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	389.100.000	198.900.000	95,63%
524114	Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	285.200.000	260.600.000	9,44%
524119	Belanja Perjadin Paket Meeting Luar Kota	1.084.100.000	1.364.700.000	-20,56%
526112	Belanja Alsin utk diserahkan ke masyarakat	1.475.244.000		
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya utk diserahkan ke masyarakat	44.286.689.000		
526122	Belanja Alsin utk diserahkan ke masyarakat dalam bentuk uang	10.060.500.000	0	#DIV/0!
Total Pagu Anggaran Belanja Barang		**84.956.413.000**	**22.755.336.000**	273,35%

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.508.668.345,00 dan Rp4.128.970.940,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -63,46% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan adanya pengurangan belanja modal di TA 2019

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.727.704,00	1.542.652.600,00	-36,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.824.800,00	1.793.602.100,00	-72,86
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	711.145.000,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	49.115.841,00	83.521.240,00	-41,19
Jumlah Belanja Kotor	**1.508.668.345,00**	**4.130.920.940,00**	**-63,48**
Pengembalian Belanja Modal	**0,00**	**-1.950.000,00**	**-100,00**
Jumlah Belanja	**1.508.668.345,00**	**4.128.970.940,00**	**-63,46**

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp972.727.704,00 dan Rp1.542.652.600,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -36,94% dibandingkan TA 2018. Penurunan belanja modal dibandingkan tahun 2018 dikarenakan adanya pengurangan anggaran belanja modal TA 2019. Belanja modal per 31 Desember 2019 meliputi pengadaan alat studio dan komunikasi, Pengadaan Alat Pengolah Data, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor dan Pengadaan Meubelair.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.727.704,00	1.542.652.600,00	-36,94
Jumlah Belanja Kotor	**972.727.704,00**	**1.542.652.600,00**	**-36,94**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**972.727.704,00**	**1.542.652.600,00**	**-36,94**

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp486.824.800,00 dan Rp1.791.652.100,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -72,83% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan di TA 2019. Belanja modal gedung dan bangunan adalah belanja penambahan pada gedung perpustakaan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.824.800,00	1.793.602.100,00	-72,86
Jumlah Belanja Kotor	**486.824.800,00**	**1.793.602.100,00**	**-72,86**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**-1.950.000,00**	**-100,00**
Jumlah Belanja	**486.824.800,00**	**1.791.652.100,00**	**-72,83**

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.115.841,00 dan Rp83.521.240,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami penurunan sebesar -41,19% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan alokasi anggaran belanja modal lainnya yaitu berupa buku perpustakaan di TA 2019

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	49.115.841,00	83.521.240,00	-41,19
Jumlah Belanja Kotor	**49.115.841,00**	**83.521.240,00**	**-41,19**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**49.115.841,00**	**83.521.240,00**	**-41,19**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp271.500.000,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Belanja Peralatan dan Mesin Untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang	271.500.000,00
Jumlah	**271.500.000,00**

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) merupakan jurnal koreksi karena temuan atas pemeriksaan BPK terhadap program BEKERJA pada belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang.

Jurnal koreksi tersebut karena BPK menganggap BAST kepada masyarakat belum lengkap/memadai, yaitu :

No	No. SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Desa / Kabupaten	Jurnal Bantuan Uang (Rp)
1	190231301008895	36.500.000	Pinangsari 10, Kab. Subang	36.500.000
2	190231301010883	30.500.000	Gegesik, Kab. Cirebon	30.500.000
3	190231301010885	44.500.000	Gegesik Lor, Kab. Cirebon	44.500.000
4	190231301011222	24.500.000	Dukuh 1, Kab. Subang	24.500.000
5	190231301012377	10.000.000	Bayalangu Lor I Kab. Cirebon	10.000.000
6	190231301028678	35.000.000	Gempolsari 3, Kab. Subang	35.000.000
7	190231301031397	38.500.000	Ketapang 1, Kab. Banyuwangi	38.500.000
8	190231301023878	13.500.000	Ciberes 1, Kab. Subang	13.500.000
9	190231301023894	38.500.000	Karangsambung, Kab. Cirebon	38.500.000
			JUMLAH	271.500.000

C.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.833.000,00 dan Rp0,00. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa yaitu yaitu berupa pembayaran sewa tanah, gedung dan bangunan untuk ATM BNI selama 2 bulan sejak habis masa TMT kontraknya per 31 Oktober 2019. Surat perjanjian sewa lahan untuk ATM BNI senilai Rp50.994.000,00 Nomor BGR/01/077/PKS/2019 tanggal 17 Desember 2019 selama 3 tahun dengan TMT 1 Nopember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2022 yang belum dibayarkan oleh BNI. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan ATM BNI	2.833.000,00
Jumlah	**2.833.000,00**

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.952.246.719,00 dan Rp377.458.700,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	42.332.950,00	30.638.300,00
Bahan untuk Pemeliharaan	400.000,00	0,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	246.102.000,00	246.102.000,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	30.800.000,00	30.800.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	69.496.400,00	69.496.400,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.561.883.369,00	0.00
Bahan Baku	1.232.000,00	422.000,00
Jumlah	**1.952.246.719,00**	**377.458.700,00**

Persediaan barang konsumsi dan bahan baku merupakan persediaan dari alat tulis kantor dan komputer supplies, bahan untuk pemelihaaan dan bahan baku, sedangkan persediaan untuk diserahkan ke masyarakat dimana fisiknya sudah tidak ada di Balai Besar Pengkajian tetapi sudah tersebar di masyarakat dan belum dikeluarkan karena masih dalam proses penyelesaian BAST. persediaan untuk diserahkan ke masyarakat terdiri dari :

a. Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat dengan nilai Rp246.102.000,00 berupa Geomembrane senilai Rp40.766.000,00; Rumah Pompa senilai Rp16.700.000,00; dan Bak Penampungan Air Besar Rp188.636.000,00 dari kegiatan Sistem Usaha Pertanian
b. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dengan nilai Rp30.800.000,00 berupa pompa sentrifugal dari kegiatan Sistem Usaha Pertanian
c. Jalan, Irigasi dan jaringan untuk diserahkan ke masyarakat dengan nilai Rp69.496.400,00 berupa Jaringan Air/Pipanisasi Pengairan senilai Rp33.550.000,00 dan Jaringan Listrik 10 KVA senilai Rp35.946.400,00 dari kegiatan Sistem Usaha Pertanian

Terdapat jurnal koreksi atas temuan pemeriksaan BPK terhadap kegiatan BEKERJA sebesar Rp1.561.883.369,00 pada barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat (akun 526xxx) karena menganggap BAST belum lengkap/memadai.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.903.587.216,00 dan Rp12.938.989.512,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**12.938.989.512,00**
Mutasi Tambah	
Pembelian	972.727.704,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-8.130.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	**13.903.587.216,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-11.027.824.355,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**2.875.762.861,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin berasal dari pembelian yaitu :

1. Lemari Penyimpan sebanyak 5 buah dengan nilai Rp23.712.804,00
2. Locker sebanyak 5 buah dengan nilai Rp7.080.000,00
3. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp8.088.300,00
4. A.C Split sebanyak 10 buah dengan nilai Rp93.830.000,00
5. Kamera Digital sebanyak 1 buah dengan nilai Rp23.851.000,00
6. P.C Unit sebanyak 3 buah dengan nilai Rp70.691.000,00
7. Laptop sebanyak 5 buah dengan nilai Rp110.001.100,00
8. Scanner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp16.000.000,00
9. Jet Pump sebanyak 3 buah dengan nilai Rp32.585.000,00
10. AF Generator Tone Generator sebanyak 1 buah dengan nilai Rp164.000.000,00
11. Rak-rak penyimpanan sebanyak 11 buah dengan nilai Rp30.129.000,00
12. Alat pengolahan lainnya sebanyak 1 buah dengan nilai Rp19.870.000,00
13. Mesin Ketik Listrik sebanyak 2 buah dengan nilai Rp14.700.000,00
14. LCD Projector/Infocus sebanyak 3 buah dengan nilai Rp25.000.000,00
15. Kursi Besi/Metal sebanyak 3 buah dengan nilai Rp8.100.000,00
16. Kursi kayu sebanyak 1 buah dengan nilai Rp9.900.000
17. Meubelair lainnya sebanyak 3 buah dengan nilai Rp70.389.500,00
18. Televisi sebanyak 1 buah dengan nilai Rp14.500.000,00
19. Amplifier sebanyak 1 buah dengan nilai Rp15.000.000,00
20. LCD Monitor sebanyak 1 buah dengan nilai Rp.184.300.000,00
21. Printer sebanyak 3 buah dengan nilai Rp. 17.500.000,00
22. Router sebanyak 1 buah dengan nilai Rp13.500.000,00

Mutasi kurang peralatan dan mesin berasal dari Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya yang sudah rusak berat dan dilakukan penghapusan BMN, berupa :

a. Portable Water Pump sebanyak 1 unit senilai Rp2.850.000,00
b. Ac Split sebanyak 1 unit senilai Rp5.280.000,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16.003.083.900,00 dan Rp14.819.976.100,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**14.819.976.100,00**
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	486.824.800,00
Koreksi Kesalahan Input IP	696.283.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	**16.003.083.900,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-944.450.799,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**15.058.633.101,00**

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa: Penambahan nilai pada bangunan gedung kantor permanen dengan nilai Rp486.824.800,00

Koreksi Kesalahan Input IP disebabkan karena adanya nilai revaluasi Barang Milik Negara berupa Bangunan gedung kantor permanen Rp654.508.000,00; Bangunan Oceanarium/Observatorium Lainnya Rp5.794.000,00; Gedung garasi/Pool semi permanen Rp-64.196.000,00; mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan permanen Rp99.429.000 dan tugu baas administrasi kepemilikan Rp748.000,00

C.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.544.823.300,00 dan Rp1.832.037.300,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.832.037.300,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-287.214.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.544.823.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-103.351.410,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**1.441.471.890,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa: koreksi kesalahan input IP karena adanya nilai revaluasi Barang Milik Negara berupa jalan khusus kompleks senilai Rp-287.214.000,00.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp443.023.459,00 dan Rp588.207.618,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**588.207.618,00**
Mutasi Tambah	
Pembelian	49.115.841,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-194.300.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	**443.023.459,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**443.023.459,00**

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya adalah berupa: Buku Perpustakaan sebanyak 427 buku dengan nilai Rp49.115.841,00

Mutasi transaksi pengurangan aset tetap lainnya yaitu berupa aset tetap renovasi gedung dan bangunan dalam renovasi senilai Rp194.300.000,00 di transfer keluar ke BPTP Sulawesi Tengah dengan nomor BAST B-2050/PL.310/H.12/8/2019 tanggal 20 Agustus 2019

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-12.652.982.549,00 dan Rp-11.825.163.262,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.903.587.216,00	-11.027.824.355,00	2.875.762.861,00
2.	Gedung dan Bangunan	16.003.083.900,00	-944.450.799,00	15.058.633.101,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.544.823.300,00	-103.351.410,00	1.441.471.890,00
4.	Aset Tetap Lainnya	443.023.459,00	0,00	443.023.459,00
Akumulasi Penyusutan		**31.894.517.875,00**	**-12.652.982.549,00**	**19.241.535.326,00**

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp45.200.000,00 dan Rp1.548.620.631,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	**1.548.620.631,00**
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	8.130.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-1.511.550.631,00
Saldo per 31 Desember 2019	**45.200.000,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-45.200.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	**0,00**

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain Rp8.130.000,00 berasal dari Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya yang sudah rusak berat dan dilakukan penghapusan BMN, berupa :

a. Portable Water Pump sebanyak 1 unit senilai Rp2.850.000,00
b. Ac Split sebanyak 1 unit senilai Rp5.280.000,00

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain berasal dari penghapusan (BMN yang dihapuskan) sebanyak Rp-1.511.550.631,00 yaitu :

1. Portable Water Pump sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.850.000,00
2. Gerobak Dorong sebanyak 4 buah dengan nilai Rp6.640.000,00
3. Mesin ketik manual standard (14-16 inchi) sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.450.000,00
4. Mesin ketik manual langewagon (18-27 inchi) sebanyak 5 buah dengan nilai Rp10.145.000,00
5. Mesin Hitung Electronik/Calculator sebanyak 4 buah dengan nilai Rp4.164.000,00
6. Lemari besi/metal sebanyak 2 buah dengan nilai Rp1.933.000,00
7. Lemari kayu sebanyak 14 buah dengan nilai Rp18.043.000,00
8. Filling cabinet besi sebanyak 6 buah dengan nilai Rp6.910.000,00
9. Brandkas sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.909.000,00
10. Kardex kayu sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.150.000,00
11. CCTV sebanyak 10 buah dengan nilai Rp40.000.000,00
12. Papan visual/papan nama sebanyak 9 buah dengan nilai Rp26.051.546,00
13. Whiteboard sebanyak 8 buah dengan nilai Rp3.032.000,00
14. Mesin absensi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp42.983.000,00
15. Overhead Projector sebanyak 4 buah dengan nilai Rp84.636.000,00
16. Whiteboard Electronik sebanyak 1 buah dengan nilai Rp10.351.000,00
17. Lampu-lampu kristal sebanyak 11 buah dengan nilai Rp32.965.000,00

18. Meja kerja kayu sebanyak 99 buah dengan nilai Rp92.756.000,00
19. Kursi bersi/metal sebanyak 210 buah dengan nilai Rp80.467.000,00
20. Kursi kayu sebanyak 8 buah dengan nilai Rp1.218.000,00
21. Sice sebanyak 5 buah dengan nilai Rp5.424.000,00
22. Meja komputer sebanyak 3 buah dengan nilai Rp1.990.000,00
23. Meja Telepon sebanyak 1 buah dengan nilai Rp192.000,00
24. Meja resepsionist sebanyak 1 buah dengan nilai Rp3.146.000,00
25. Jam elektronik sebanyak 3 buah dengan nilai sebanyak Rp1.125.000,00
26. Mesin penghisap debu/vacuum cleaner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp2.435.000,00
27. Mesin pemotong rumput sebanyak 3 buah dengan nilai Rp5.579.000,00
28. Lemari es sebanyak 1 buah dengan nilai Rp913.000,00
29. AC Split sebanyak 8 buah dengan nilai Rp38.661.000,00
30. Exhaust fan sebanyak 2 buah dengan nilai Rp1.100.000,00
31. Rak Piring Alumunium sebanyak 1 buah dengan nilai Rp600.000,00
32. Televisi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp42.877.273,00
33. Tape Recorder sebanyak 5 buah dengan nilai Rp2.625.000,00
34. Loudspeaker sebanyak 4 buah dengan nilai Rp3.294.000,00
35. Laser Disc sebanyak 1 buah dengan nilai Rp950.000,00
36. Wireless sebanyak 2 buah dengan nilai Rp10.340.000,00
37. Mic Conference sebanyak 1 buah dengan nilai Rp2.850.000,00
38. Unit Power Supply sebanyak 15 buah dengan nilai Rp20.258.000,00
39. Tustel sebanyak 1 buah dengan nilai Rp1.712.000,00
40. Tangga Aluminium sebanyak 2 buah dengan nilai Rp1.865.000,00
41. Dispenser sebanyak 7 buah dengan nilai Rp7.500.000,00
42. Karpet sebanyak 1 buah dengan nilai Rp24.300.000,00
43. Lampu sebanyak 1 buah dengan nilai Rp650.000,00
44. Alat rumah tangga lainnya (Home use) sebanyak 3 buah dengan nilai Rp1.350.000,00
45. Intercom unit sebanyak 8 buah dengan nilai Rp488.000,00
46. Telephone (PABX) sebanyak 1 buah dengan nilai Rp8.842.000,00
47. Pesawat telepon sebanyak 1 buah dengan nilai Rp600.000,00
48. Handy talky (HT) sebanyak 9 buah dengan nilai Rp13.680.000,00
49. Faximile sebanyak 2 buah dengan nilai Rp7.462.000,00
50. Alat Komunikasi Lainnya sebanyak 1 buah dengan nilai Rp10.900.000,00
51. Personal Computer sebanyak 4 buah dengan nilai Rp48.391.000,00
52. Sprayer sebanyak 2 buah dengan nilai Rp800.000,00
53. Local Area Network (LAN) sebanyak 8 buah dengan nilai Rp13.450.000,00
54. PC Unit sebanyak 37 buah dengan nilai Rp291.455.000,00
55. Lap Top sebanyak 18 buah dengan nilai Rp351.490.000,00
56. Floppy Disk Unit sebanyak 3 buah dengan nilai Rp1.275.000,00
57. Hard Disk sebanyak 2 buah dengan nilai Rp2.250.000,00
58. Monitor sebanyak 3 buah dengan nilai Rp4.075.000,00
59. Printer sebanyak 17 buah dengan nilai Rp60.695.900,00
60. Scanner sebanyak 2 buah dengan nilai Rp4.525.000,00
61. External sebanyak 2 buah dengan nilai Rp4.500.000,00
62. Hub sebanyak 4 buah dengan nilai Rp6.160.000,00
63. Wireless Access Pointe sebanyak 6 buah dengan nilai Rp11.450.000,00

64. Mobile Modem GSM/CDMA sebanyak 2 buah dengan nilai Rp900.000,00
65. CD/VCD/DVD/LD sebanyak 35 buah dengan nilai Rp13.771.412,00

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-45.200.000,00 dan Rp-1.534.849.219,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	45.200.000,00	-45.200.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		**45.200.000,00**	**-45.200.000,00**	**0,00**

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.650.333,00 dan Rp17.555.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa sewa ATM BRI sebesar Rp50.979.000,00 sesuai perjanjian pinjam pakai nomor B.239-KC/XIV/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 selama tiga tahun TMT 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2022. Pendapatan sewa diterima dimuka merupakan sewa diterima dimuka tahun 2020 dengan nilai Rp39.650.333,00 diterima Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	39.650.333,00	17.555.000,00
Jumlah	**39.650.333,00**	**17.555.000,00**

Pendapatan di terima di muka

		Mulai	Sampai	2019	2020	2021	2022	Total Bulan	per bulan
BRI	50.979.000	01 Mei 2019	30 April 2022	8	12	12	4	36	1.416.083
Nomor kontrak B.239-KC/XIV/12/2019				11.328.667	16.993.000	16.993.000	5.664.333	50.979.000	
tgl 11-12-2019				11.328.667	16.993.000	16.993.000	5.664.333		
sdh dibayar									
31-Des-19		Memo Penyesuaian - Pendapatan di terima dimuka							
		423141	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan (D)					39.650.333	
		219212	Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka (K)					39.650.333	

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.428.464.712,00 dan Rp18.727.722.380,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp65.791.817,00 dan Rp79.015.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	32.350.000,00	47.050.000,00	-31,24
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	33.441.817,00	31.965.000,00	4,62
Jumlah	**65.791.817,00**	**79.015.000,00**	**-16,74**

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan sewa ATM selama 12 bulan dengan nilai Rp.17.555.000,00 (ATM BNI dan ATM BRI) dan Rp.11.328.667,00 (ATM BRI), pendapatan yang masih harus diterima dari sewa tanah, gedung dan bangunan ATM BNI selama 2 Bulan dengan nilai Rp2.833.000,00 dan pendapatan dari sewa kantin dan rumah dinas an. Dr. Sigid Handoko, M.Si dengan nilai Rp1.725.150,00. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house).

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.351.469.298,00 dan Rp8.277.340.841,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.352.313.142,00	5.255.509.260,00	1,84
Beban Pembulatan Gaji PNS	69.425,00	73.841,00	-5,98
Beban Tunj. Anak PNS	107.661.605,00	103.748.051,00	3,77
Beban Tunj. Beras PNS	247.004.940,00	250.237.860,00	-1,29

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.303.930.000,00	1.313.190.000,00	-0,71
Beban Tunj. PPh PNS	96.825.028,00	87.822.191,00	10,25
Beban Tunj. Struktural PNS	106.555.000,00	103.110.000,00	3,34
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	393.809.158,00	383.694.678,00	2,64
Beban Tunjangan Umum PNS	106.150.000,00	110.881.960,00	-4,27
Beban Uang Lembur	59.084.000,00	107.221.000,00	-44,90
Beban Uang Makan PNS	578.067.000,00	561.852.000,00	2,89
Jumlah	**8.351.469.298,00**	**8.277.340.841,00**	**0,90**

Jumlah pegawai pada Balai Besar Pengkajian sebanyak 98 orang dengan jumlah eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, eselon IV sebanyak 7 orang, jabatan fungsional peneliti 33 orang, penyuluh 13 orang, analis kepegawaian 7 orang, pustakawan 1 orang, calon pranata komputer 1 orang, dan jabatan fungsional umum 46 orang. Jabatan fungsional umum jumlahnya paling banyak dan tersebar di bagian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, program dan penganggaran, kerjasama, penelitian dan pengkajian.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.082.668.510,00 dan Rp2.148.181.150,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	8.824.000,00	17.337.000,00	-49,80
Beban Persediaan konsumsi	2.073.749.510,00	2.115.869.650,00	-62,53
Beban persediaan lainnya	95.000,00	14.974.500,00	-100,00
Jumlah	**2.082.668.510,00**	**2.148.181.150,00**	**-62,69**

Beban persediaan digunakan untuk membiayai keperluan barang habis pakai dalam menunjang seluruh kegiatan di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian seperti ATK, Cetakan dan Bahan Pendukung lainnya.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.876.703.142,00 dan Rp9.987.131.520,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	4.343.350.713,00	2.766.970.325,00	56,97
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.209.870.350,00	2.956.074.225,00	-25,24
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	265.095.000,00	166.730.000,00	59,00
Beban Honor Output Kegiatan	2.870.801.125,00	278.455.000,00	930,97
Beban Jasa Konsultan	17.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	141.823.772,00	289.278.000,00	-50,97
Beban Jasa Profesi	1.623.065.000,00	1.378.400.000,00	17,75
Beban Keperluan Perkantoran	1.698.722.000,00	1.540.966.355,00	10,24
Beban Langganan Air	53.851.500,00	48.227.400,00	11,66
Beban Langganan Listrik	347.720.965,00	342.772.044,00	1,44
Beban Langganan Telepon	27.467.617,00	52.263.171,00	-47,44
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	57.000.000,00	52.250.000,00	9,09
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36.454.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa	184.481.100,00	114.745.000,00	60,77
Jumlah	**13.876.703.142,00**	**9.987.131.520,00**	**38,95**

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyakan dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN. Beban Jasa Profesi digunakan untuk membiayai narasumber sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Beban keperluan kantor digunakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya). Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya. Beban penambah daya tahan tubuh digunakan

untuk membiayai makanan penambah daya tahan tubuh untuk menunjang kondisi fisik satpam.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.715.139.483,,00 dan Rp1.863.506.649,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	550.630.623,00	713.939.400,00	-22,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.120.942.860,00	1.073.106.832,00	4,46
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	43.566.000,00	76.460.417,00	-43,02
Jumlah	**1.715.139.483,00**	**1.863.506.649,00**	**-7,96**

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman gedung. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, pompa air, mesin potong rumput, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan mesin absensi, perawatan peralatan audio system, lemari kayu, pemeliharaan kunci-kunci pintu, lemari dan kardek, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional kendaraan bermotor, perpustakaan, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan antena dan server, pemeliharan CCTV, pemeliharaan dispenser serta pemeliharaan penggantian kain kursi kerja.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.777.426.014,00 dan Rp7.674.856.882,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	7.400.334.098,00	5.938.933.957,00	24,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	268.216.000,00	194.390.000,00	37,98
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	177.865.000,00	229.965.000,00	-22,66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	931.010.916,00	1.311.567.925,00	-29,02
Jumlah	**8.777.426.014,00**	**7.674.856.882,00**	**14,37**

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Pengkajian yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan pengkajian dan diseminasi maupun kegiatan yang menyangkut administrasi.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp46.278.378.033,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	36.376.878.033,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	9.786.000.000,00	0,00	0,00
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	115.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**46.278.378.033,00**	**0,00**	**0,00**

Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdiri dari :

a. Barang persediaan lainnya untuk dijual ke masyarakat dengan nilai Rp36.376.878.033,00 terdiri dari ayam DOC, pakan ternak, vitamin obat dan vaksin, lampu dan perlengkapannya, tempat pakan, tempat minum, coolbox, showcase, box kardus kandang brooder dimana fisiknya sudah tidak ada di satker Balai Besar Pengkajian tetapi sudah tersebar di masyarakat yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten banyuwangi terdiri dari 20.121 RTM

b. Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat/Pemda dalam bentuk uang kandang merupakan bantuan pembuatan kandang ayam dengan total penerima sebanyak 20.121 RTM dengan jumlah Rp500.000,00 untuk 1 RTM (50 ekor DOC)

c. Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat merupakan transfer masuk ayam DOC dari BPTP Jawa Timur senilai Rp108.500.000,00 dan BPTP Yogyakarta senilai Rp7.000.000,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.898.550.798,00 dan Rp2.362.929.198,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.259.467,00	354.562.840,00	12,61
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	260.548.414,00	711.145.000,00	-63,36
Beban Penyusutan Jaringan	13.701.706,00	13.701.706,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	4.050.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.225.041.211,00	1.279.469.652,00	-4,25
Jumlah	**1.898.550.798,00**	**2.362.929.198,00**	**-19,65**

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban yang disebabkan adanya penyusutan atau pengurangan masa manfaat terhadap barang milik negara pada tahun anggaran 2019

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-13.771.412,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-1.251.575.072,00	-1.843.539,00	8.924,70
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	980.668.210,00	47.454.875,00	1.383,91
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	21.555.999,00	22.775.000,00	-5,35
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	64.021.423,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	34.004.006,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.516.200,00	4.927.330,00	275,79
Jumlah	**-244.605.075,00**	**171.339.095,00**	**229,24**

Beban kerugian pelepasan aset dengan nilai Rp13.771.412,00 merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam penggunaanya yaitu CD/DVD/VCD/LD yang sudah dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 210/Kpts/PL.320/A/3/2019 tanggal 11 Maret 2019. Beban penyesuaian nilai persediaan pendapatan penyesuaian nilai persediaan merupakan akumulasi dari selisih antara harga dan harga akhir, Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin merupakan hasil bersih dari lelang BMN berdasarkan risalah lelang nomor 1049/32/2019 tanggal 3 Juli 2019, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian gaji TAYL bulan Nopember – Desember 2019 An. Tri Nova Alyanti, S.Ikom sebesar Rp6.396.200,00 dan setoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional TA 2017 – 2018 An. Dr. Sudi Mardianto, M.Si sebesar Rp11.550.000,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp570.000,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.727.722.380,00 dan Rp17.018.376.137,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-83.159.148.536,00 dan Rp-32.063.592.145,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.471.670.511,00 dan Rp2.560.866,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp409.069.000,00 dan Rp0,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	696.283.000,00
Jalan dan Jembatan	-287.214.000,00
Jumlah	409.069.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.062.601.511,00 dan Rp2.560.866,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-26.299.918,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.088.901.429,00
Jumlah	**1.062.601.511,00**

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp84.388.220.357,00 dan Rp33.770.377.522,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	84.592.146.706,00
Diterima dari Entitas Lain	-125.126.349,00
Transfer Keluar	-194.300.000,00
Transfer Masuk	115.500.000,00
Jumlah	**84.388.220.357,00**

Ditagihkan ke entitas lain merupakan terdiri dari belanja pegawai Rp8.351.469.298,00, belanja barang Rp74.732.009.063,00; dan belanja modal Rp1.508.668.345,00.

Diterima dari entitas lain merupakan :

1. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin merupakan pendapatan dari lelang BMN yang sudah dihapuskan penggunaannya (risalah lelang nomor 1049/32/2019 tanggal 3 Juli 2019)
2. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa kantin dari bulan januari sampai dengan Februari 2019 sebesar Rp. 633.000,00 berdasarkan pada surat perjanjian B-103.2/RT.010/H.12/01/2019 tanggal 1 Januari 2019, sewa rumah dinas an. Dr. Sigid Handoko,SP, M.Si dari bulan januari sampai dengan Agustus 2019 melalui potongan SPM Gaji sebesar Rp. 1.092.150,00 dan sewa tanah, gedung dan bangunan untuk ATM BRI sebesar Rp.50.979.000,00 sesuai kontrak nomor B.239-KC/XIV/12/2019 tanggal 11 Desember 2019.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp32.350.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan sewa rumah tamu (*guest house*) yang mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2019.

4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL yaitu pengembalian belanja pegawai gaji dan tunjangan fungsional tahun 2018 an. Tri Nova Rp. 6.396.200,00 dan Dr. Sudi Mardianto Rp. 11.550.000,00 dan penerimaan kembali belanja fungsional sebesar Rp. 570.000,00 yang dikembalikan ke negara pada tahun 2019**.**

Transfer keluar merupakan transfer BMN berupa Gedung Dalam Renovasi (Aset Tetap Renovasi) ke BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp194.300.000,00

Transfer masuk merupakan transfer persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dari BPTP Jawa Timur sebanyak 31.000 ekor dengan nilai Rp108.500.000,00 dan BPTP Yogyakarta sebanyak 2.000 ekor dengan nilai Rp7.000.000,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-125.126.349,00 sedangkan DKEL sebesar Rp84.592.146.706,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp115.500.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	018090400633975000KD	7.000.000,00
2.	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	018090500567364000KD	108.500.000,00
Jumlah			**115.500.000,00**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-194.300.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Aset Tetap Renovasi	018091800567673000KD	-194.300.000,00
Jumlah			**-194.300.000,00**

Transfer keluar merupakan transfer BMN berupa Gedung Dalam Renovasi (Aset Tetap Renovasi) ke BPTP Sulawesi Tengah sebesar Rp194.300.000,00

Transfer masuk merupakan transfer persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dari BPTP Jawa Timur sebanyak 31.000 ekor dengan nilai Rp108.500.000,00 dan BPTP Yogyakarta sebanyak 2.000 ekor dengan nilai Rp7.000.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.428.464.712,00 dan Rp18.727.722.380,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terjadi kesalahan pencatatan di aplikasi persediaan pada kegiatan pengembangan hasil inovasi ternak unggas untuk mendukung pengentasan kemiskinan berupa pembelian DOC yang diinput ke dalam barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat seharusnya diinput ke dalam akun hewan dan tanaman untuk diserahkan ke masyarakat.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Bantuan Pemerintah Kegiatan Bekerja ditemukan adanya beberapa BAST yang kurang lengkap/memadai sehingga terdapat UJK terhadap belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang senilai Rp. 271.500.000,00 sehingga dilakukan jurnal koreksi belanja barang dibayar dimuka (Prepaid) yaitu pada 4 Desa di Kabupaten Subang, 4 Desa di Kabupaten Cirebon dan 1 Desa di Kabupaten Banyuwangi serta UJK terhadap belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat sebesar Rp1.561.883.369,00 yang dimasukkan kembali ke dalam neraca persediaan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain